

LAPORAN KINERJA INTERIM

LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN
TRIWULAN III TAHUN 2020



LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas karunia-Nya memberikan inspirasi dan semangat untuk menyelesaikan Laporan Kinerja Interim Triwulan II. Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LKj- LPTK) ini. Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan kegiatan DIPA LPTK Wakatobi pada Triwulan III. Tahun Anggaran 2020 dan disusun sebagai implementasi Peraturan Presiden (PERPRES) No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja berkewajiban menyelenggarakan SAKIP dan pelaksanaannya disusun dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj). LKj merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan a. rencana strategis; b. perjanjian Kinerja; c. pengukuran Kinerja; d. pengelolaan data Kinerja; e. pelaporan Kinerja; dan f. reviu dan evaluasi Kinerja. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

Laporan ini menyajikan hasil pencapaian kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan pada Triwulan III Tahun 2020. Semoga laporan ini bermanfaat meskipun masih terdapat kekurangan dalam hal cara penyajian dan sistematika penyusunan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan ke depan. Semoga Allah SWT berkenan memberikan perlindungan dan ridho-Nya atas semua upaya.

Wakatobi, Oktober 2020

Kepala LPTK,



Akhmatul Ferlin

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kegiatan perekayasaan yang dilakukan oleh LPTK diarahkan untuk menjalankan fungsi pengembangan institusi, menciptakan inovasi dan pengembangan teknologi yang dilakukan melalui kerjasama lintas instansi, baik pemerintah maupun swasta. Sebagai institusi riset di bawah BRSDM KP, LPTK bertugas melakukan perekayasaan di bidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. LPTK berkomitmen untuk mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam merencanakan program kerjanya sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.40/Men/2011 yang diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/Permen-KP/2018 yaitu: a. penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan; b. pelaksanaan perekayasaan teknologi kelautan di bidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; c. pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama perekayasaan teknologi kelautan di bidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Anggaran pelaksanaan kegiatan Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan TA. 2020, terdiri dari anggaran Komponen Inovasi Kelautan yang Dihasilkan, Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, Layanan Perkantoran, dengan total pagu Rp 5.653.195.000,- yang terbagi kedalam 5 (lima) jenis keluaran (output). Komponen Sarana dan Prasarana Riset Kelautan Rp 100.000.000,- , Prototipe Alat dan Mesin Hasil Riset dan Perekayasaan Kelautan Rp 150.000.000,- , Alat dan Mesin hasil Riset dan Perekayasaan Kelautan Siap Guna Rp 480.000.000,- , Layanan Dukungan Manajemen Rp 415.116.000,- , Layanan Perkantoran Rp 4.508.079.000,-. Dalam menjalankan fungsi Organisasi, Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan didukung oleh Jumlah Pegawai sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional dan staf pelaksana. Jumlah pegawai LPTK yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebanyak 13 (tiga belas) orang, sedangkan 14 (empat belas) orang merupakan Pegawai Kontrak dengan latar belakang pendidikan dan mulai Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Diploma dan Sarjana.

Untuk menjalankan tugas yang diamanatkan maka ditetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan dengan Kepala Pusat Riset Kelautan. Pada Kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi dengan 2 Sasaran Strategis (SS) yang ingin dicapai. Untuk setiap Sasaran Strategis (SS) yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Keseluruhan IKU LPTK pada tahun 2020 berjumlah 10 Indikator Kinerja Utama (IKU) sama dengan jumlah IKU tahun 2019. Capaian Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2020 Triwulan III adalah 107.59%. Beberapa sasaran strategis Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan yang telah dicapai diantaranya sebagai berikut :

1. Hasil Perekayasaan Teknologi Kelautan yang dimanfaatkan.
2. Tatakelola Pemerintahan yang Baik pada Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden (PERPRES) No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja berkewajiban menyelenggarakan SAKIP dan pelaksanaannya disusun dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj). LKj merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan a. rencana strategis; b. perjanjian Kinerja; c. pengukuran Kinerja; d. pengelolaan data Kinerja; e. pelaporan Kinerja; dan f. reviu dan evaluasi Kinerja. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

B. TUJUAN

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja ini, bertujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian pada Triwulan III Tahun 2020.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi satuan kerja untuk meningkatkan kinerjanya.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Loka Perencanaan Teknologi Kelautan, yang selanjutnya disebut LPTK, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Riset Kelautan (PRK) – Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP). LPTK memiliki tugas melakukan perikanan teknologi kelautan dalam rangka mendukung visi BRSDM KP, yakni sebagai Inovator IPTEK dan Motivator Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan.

Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh LPTK diarahkan untuk menjalankan fungsi pengembangan institusi, menciptakan inovasi dan pengembangan teknologi yang dilakukan melalui kerjasama lintas instansi, baik pemerintah maupun swasta. Sebagai institusi riset di bawah BRSDM KP, LPTK bertugas melakukan perikanan di bidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. LPTK berkomitmen untuk mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam merencanakan program kerjanya sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.40/Men/2011

yang diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/Permen-KP/2018 yaitu: a. penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan; b. pelaksanaan perekayasaan teknologi kelautan di bidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; c. pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama perekayasaan teknologi kelautan di bidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

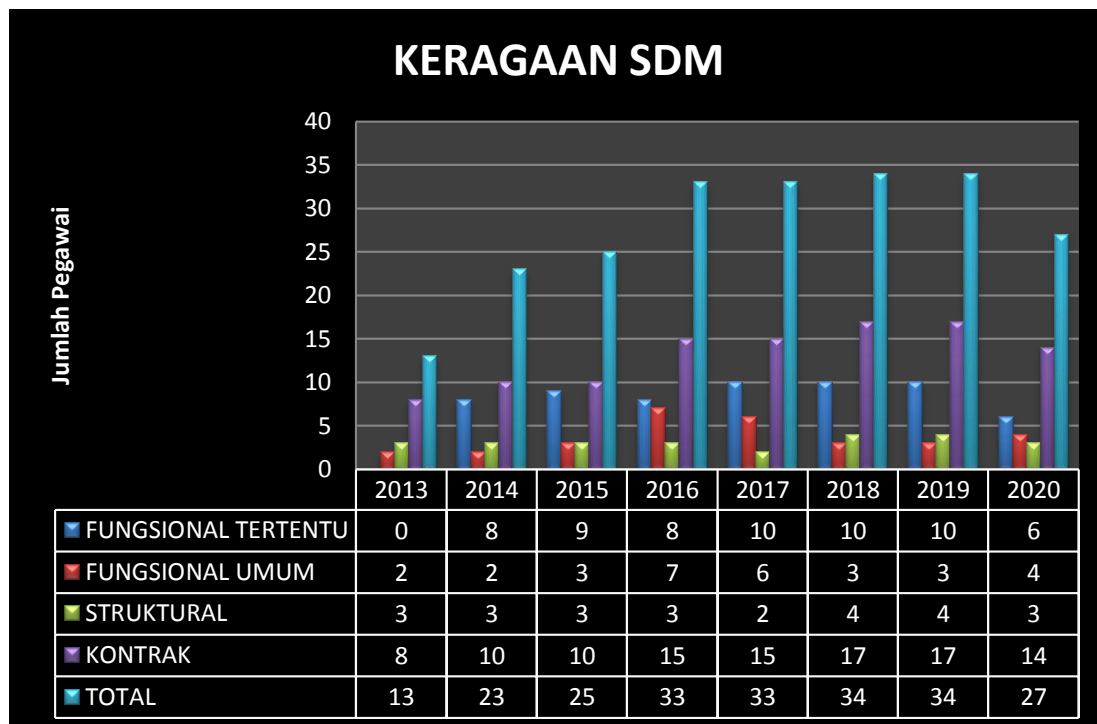
Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, LPTK dibantu oleh unit kerja dibawahnya yang terdiri dari a. Urusan Tata Usaha; b. Subseksi Tata Operasional; c. Subseksi Pelayanan Teknis; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, persuratan, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, serta tata laksana. Subseksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan. Subseksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, publikasi, diseminasi, kerjasama, dan pengelolaan prasarana dan sarana perekayasaan teknologi kelautan di bidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta perpustakaan. Sedangkan Kelompok fungsional mempunyai tugas melaksanakan: a. perekayasaan teknologi kelautan di bidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan b. kegiatan lainnya yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.



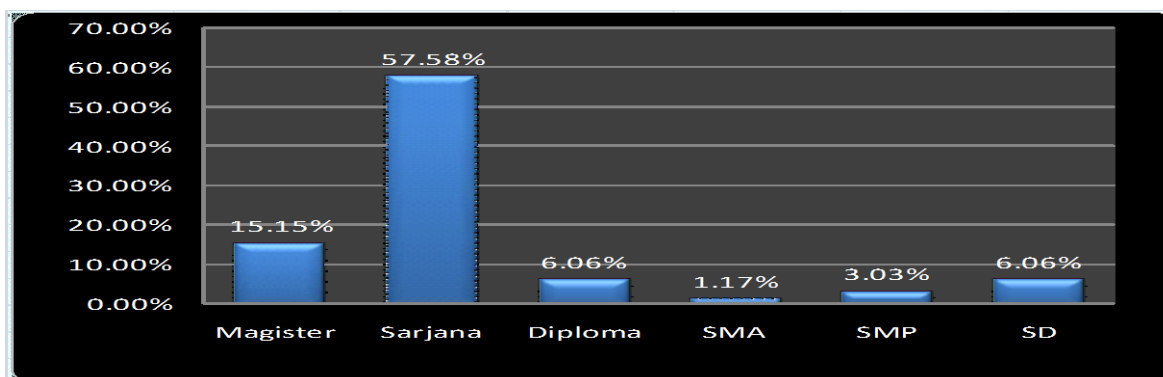
Struktur Organisasi Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

D. KERAGAAN SDM

Jumlah Pegawai LPTK sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang dengan tingkat pendidikan dan disiplin ilmu yang beragam, terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional dan staf pelaksana. Jumlah pegawai LPTK yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebanyak 13 (tiga belas) orang, sedangkan 14 (empat belas) orang merupakan Pegawai Kontrak dengan latar belakang pendidikan dan mulai Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Diploma dan Sarjana. Komposisi SDM LPTK dari tahun 2013 - 2020 dapat dilihat pada grafik berikut :



Klasifikasi Pegawai LPTK Berdasarkan Jabatan



Klasifikasi Pegawai LPTK Berdasarkan Pendidikan

E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan sebagai berikut :

1. **Ringkasan Eksekutif**, Pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Triwulan III tahun 2020
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang LPTK seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di LPTK

3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Strategis LPTK 2019-2024, Rencana Kerja Tahunan, dan Penetapan kinerja LPTK Tahun 2020 serta Pengukuran Kinerja.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya
5. **Bab IV Penutup**, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi.

BAB II

PERENCANAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Loka Perencanaan Teknologi Kelautan (LPTK) tahun 2020-2024, mengacu pada Renstra Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) dan Pusat Riset Kelautan (Pusriskel). Visi BRSDM KP dan Pusriskel pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Visi BRSDM KP dan Pusriskel menjadi penting dengan keberadaan LPTK sebagai UPT pendukung untuk mencapai tujuan RPJMN tahap IV. Peran strategis keberadaan LPTK yaitu mendukung visi dan misi BRSDM KP dan Pusriskel melalui kegiatan perencanaaan teknologi kelautan.

Peran strategis LPTK meliputi: 1) merumuskan perencanaan pembangunan KP nasional melalui penyediaan hasil perencanaaan teknologi kelautan; 2) menyelenggarakan perencanaaan teknologi kelautan yang mengikuti perkembangan era globalisasi dan ekonomi digital; 3) menghasilkan perencanaaan teknologi kelautan inovatif dan implementatif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat; 4) melaksanakan pengelolaan alih teknologi bidang kelautan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran; 5) melakukan sharing Knowledge Base Management System (BMS) dalam mengaplikasikan hasil perencanaaan teknologi kelautan; 6) mewujudkan tata kelola perencanaaan yang baik dan melakukan kerja sama dengan lembaga/instansi dalam dan luar negeri; 7) Meningkatkan kontribusi PNB (royalti dan Hak Kekayaan Intelektual/HAKI) melalui hasil perencanaaan teknologi kelautan. Berdasarkan hal tersebut, LPTK melakukan penyusunan Renstra 2020-2024, untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pusriskel, BRSDM KP dan KKP serta sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 yaitu mewujudkan masyarakat sektor KP yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

1. Visi

Visi LPTK pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi Pusriskel, BRSDM, dan KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

2. Misi

Misi LPTK adalah menjalankan misi Presiden, KKP, BRSDM, dan Pusriskel dalam bidang kelautan dan perikanan. Dari 9 (sembilan) misi Presiden, LPTK mendukung 4 (empat) misi yang merupakan modifikasi dari misi yang diemban oleh KKP, BRSDM, dan Pusriskel. Modifikasi dilakukan dengan penyesuaian kegiatan yang dilaksanakan oleh LPTK, yaitu :

1. Misi ke-1: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan.
2. Misi ke-2: Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan terhadap Perekonomian Nasional melalui Hasil Riset Kelautan.
3. Misi ke-4: Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan.
4. Misi ke-8: Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Riset Kelautan.

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

3. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi LPTK, maka tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

1. Menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
2. Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing.
3. Menghasilkan dan mengembangkan riset dan inovasi mendukung pembangunan berkelanjutan.
4. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan menajerial riset dan SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.

4. Sasaran Strategis

LPTK telah menetapkan 2 Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada tahun 2020-2024, setiap Sasaran Strategis memiliki satuan ukur pencapaian yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah “Hasil Riset dan Inovasi yang dimanfaatkan”, dengan indikator kinerja:

- Hasil riset kelautan yang dimanfaatkan oleh masyarakat/sector industri pada tahun 2020 1 paket menjadi 7 hingga tahun 2024.
- Prototipe alat dan mesin hasil riset inovasi teknologi kelautan pada tahun 2020 1 paket menjadi 8 paket hingga tahun 2024.
- Karya Tulis Ilmiah riset kelautan yang dipublikasikan 5 KTI pada tahun 2020, target total capaian KTI sampai dengan tahun 2024 adalah 28 buah KTI yang diterbitkan.
- Jejaring dan/atau kerjasama riset kelautan yang disepakati dan ditindaklanjuti pada tahun 2020 sebanyak 2 dokumen menjadi 15 dokumen hingga tahun 2024.
- Unit kerja riset kelautan yang ditingkatkan sarana dan prasarannya 1 unit pada tahun 2020 menjadi 3 unit hingga tahun 2024.

Sasaran strategis ke dua (SS-2) “Tatakelola pemerintahan yang baik” dengan indikator kinerja:

- Indeks Profesionalisme ASN LPTK bernilai 72 hingga tahun 2024.
- Unit kerja LPTK yang menerapkan Manajemen Pengetahuan yang terstandar, pada tahun 2020 sebesar 82%.
- Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK adalah Baik (88) pada tahun 2020 sampai tahun 2024.
- Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK dibandingkan realisasi anggaran sebesar 1% setiap tahunnya dari 2020 sampai 2024.
- Nilai Kinerja Anggaran LPTK pada tahun 2020 sebesar 85 sampai tahun 2024

5. Potensi dan Permasalahan

a) Potensi

Keberadaan SDM dan IPTEK memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan riset. Dengan SDM yang dimiliki serta gedung mekatronika kelautan dan Laboratorium Simlan kegiatan perekayasaan yang dilakukan oleh LPTK

diarahkan untuk menjalankan fungsi pengembangan institusi, menciptakan inovasi dan pengembangan teknologi yang dilakukan melalui kerjasama lintas instansi, baik pemerintah maupun swasta.

b) Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi diantaranya :

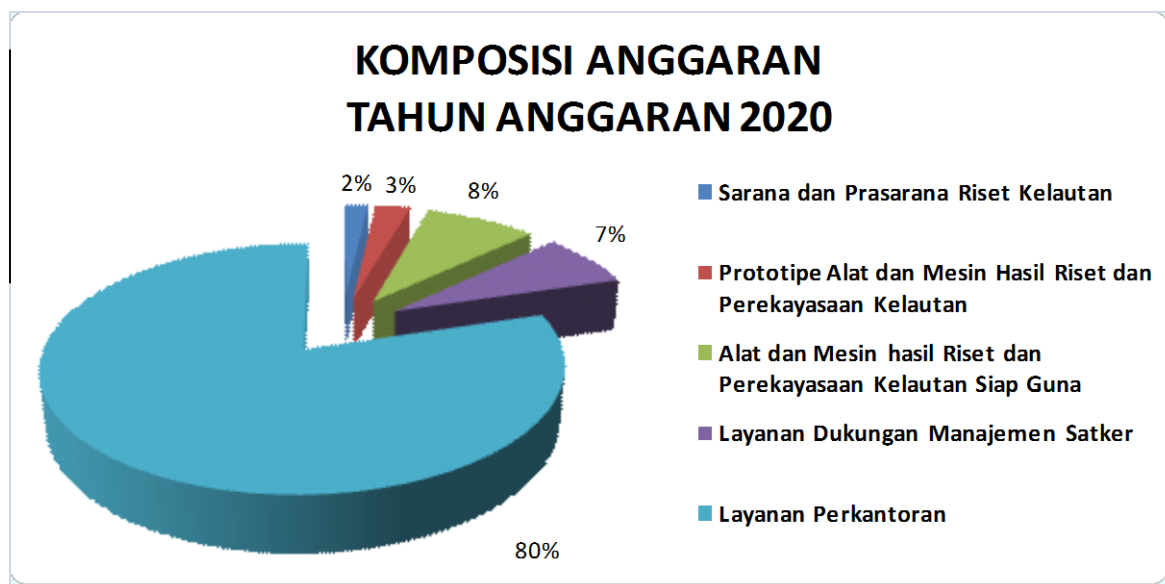
- 1) Masih tumpang tindihnya kegiatan riset yang dilakukan oleh LPTK dengan kegiatan riset yang dilakukan satker lain baik lingkup BRSDM KP maupun lingkup KKP terutama dalam bidang perekayasaan alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan sumberdaya laut.
- 2) Masih terdapatnya kelemahan dalam research management di tingkat institusi dan peneliti/perekayasa (mulai dari pembuatan proposal sampai dengan pelaporan dan diseminasi hasil).

B. RENCANA KERJA TAHUNAN

Sebagai pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) maka tiap tahun ditetapkan Rencana Kerja (Renja). Dokumen rencana kerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan merupakan dokumen perencanaan kegiatan yang menjelaskan secara garis besar rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, terdiri dari 4 (empat) output kegiatan, 1 (satu) kegiatan pengadaan modal, 2 (dua) kegiatan riset, 1 (satu) kegiatan manajerial, dan 1 (satu) kegiatan layanan perkantoran. Rencana Kerja yang disusun adalah seperti terlihat pada Tabel.

Tabel Rencana Kerja Tahun 2020 LPTK

NO	JENIS OUTPUT	TARGET	SATUAN
1	Sarana dan Prasarana Riset Kelautan	1	Unit
2	Prototipe Alat dan Mesin Hasil Riset dan Perekayasaan Kelautan	1	Paket
3	Alat dan Mesin hasil Riset dan Perekayasaan Kelautan Siap Guna	1	Paket
4	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan
5	Layanan Perkantoran	1	Layanan



Gambar Komposisi Anggaran DIPA T.A 2020

Anggaran pelaksanaan kegiatan Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan TA. 2020, terdiri dari anggaran Sarana dan Prasarana Riset Kelautan, Prototipe Alat dan Mesin Hasil Riset dan Perekayasaan Kelautan, Alat dan Mesin hasil Riset dan Perekayasaan Kelautan Siap Guna, Layanan Dukungan Manajemen Satker, Layanan Perkantoran, dengan total pagu Rp 5.653.195.000,- yang terbagi kedalam 5 (lima) jenis keluaran (output). anggaran Sarana dan Prasarana Riset Kelautan Rp 100.000.000,- , Prototipe Alat dan Mesin Hasil Riset dan Perekayasaan Kelautan Rp 150.000.000,- , Alat dan Mesin hasil Riset dan Perekayasaan Kelautan Siap Guna Rp 480.000.000,- , Layanan Dukungan Manajemen Satker Rp 415.116.000,- , Layanan Perkantoran Rp 4.508.079.000,- , adapun proporsi anggarannya seperti pada gambar diatas. Pada Tiap Subseksi anggaran tersebut dapat klasifikasikan :

1. Kepala Urusan Tata Usaha memiliki anggaran Rp. 5.427.221.000
2. Kepala Subseksi Tata Operasional memiliki anggaran Rp. 117.802.000
3. Kepala Subseksi Pelayanan Teknis memiliki anggaran Rp. 108.172.000

C. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka dibuat Perjanjian Kinerja LPTK tahun 2020 yang telah menerapkan/menggunakan manajemen kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) yang berisi langkah-langkah strategis jangka menengah yang akan memberi arah bagi para penanggung jawab kegiatan dalam melaksanakan tugas.

Penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Kepala Pusat Riset Kelautan dilakukan pada bulan Januari 2020 dimana terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 10 (Sepuluh) Indikator Kinerja Utama, namun pada Bulan Juni terjadi perubahan Perjanjian Kinerja, beberapa perubahan antara lain :

- o Pada sasaran strategis Hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan dengan IKU Desa mitra/kawasan yang menerapkan iptek hasil perekayasaan teknologi kelautan dihapuskan dan diganti dengan IKU Prototipe alat dan mesin hasil hasil perekayasaan teknologi untuk pelestarian wilayah konservasi. Hal ini karena riset LPTK belum diterapkan pada desa

mitra/kawasan namun baru berupa prototipe yang akan coba diimplementasikan pada wilayah konservasi.

- o Pada sasaran strategis Tata Kelola Pemerintahan yang Baik terjadi penambahan IKU Nilai kinerja anggaran Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan. Hal ini didasarkan atas hasil tindaklanjut surat Kementerian Kelautan dan perikanan Inspektorat Jendral Nomor 1.26/ITJ.0/RC.610/III/2020 mengenai pengimplemantasian peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- o Pada sasaran strategis terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima IKU Perentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan, dihapus dan hanya menjadi IKU Level 2 Pusat Riset Kelautan.

Adapun Perjanjian Kinerja tahun 2020 setelah direvisi sesuai tabel dibawah ini :

Tabel Perjanjian Kinerja LPTK Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		OUTPUT
1.	Hasil Perekayasaan Teknologi Kelautan yang dimanfaatkan	1.	Hasil Perekayasaan Teknologi Kelautan kelautan yang dimanfaatkan oleh sektor industri (Paket)	1
		2.	Prototipe alat dan mesin hasil hasil perekayasaan teknologi untuk pelestarian wilayah konservasi (Paket)	1
		3.	Unit kerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan yang ditingkatkan sarana dan prasarananya (Lokasi)	1
		4.	Jumlah jejaring dan/atau kerjasama Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)	2
		5.	Jumlah Karya Tulis Ilmiah hasil Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan yang dipublikasikan (Dokumen)	5
2.	Tatakelola Pemerintahan yang Baik pada Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	6.	Indeks profesionalitas ASN Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (Indeks)	72

	7.	Persentase unit kerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82
	8.	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (Nilai)	Baik (88)
	9.	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan dibandingkan realisasi anggaran Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan TA. 2019 (Persen)	1
	10.	Nilai kinerja anggaran Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	85

D. PENGUKURAN KINERJA

1. Rumus Pengukuran

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peta strategi yang dituangkan pada penetapan kinerja tahun 2020 dapat tercapai.

Pengukuran kinerja LPTK pada tahun 2020 mengacu pada hasil pengukuran yang telah ditetapkan dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan alamat website :<http://kinerjaku.kkp.go.id/app/> Penilaian pencapaian sasaran diukur berdasarkan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS).

Tabel Sistem Pembobotan Atas Tingkat Validasi IKU

No	Validitas IKU	Bobot
1	Lead input	0,1
2	Lead proses	0,2
3	Lag output	0,3
4	Lag outcome	0,4

NPSS adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh IKU di dalam satu Sasaran Strategis (SS). Status capaian SS yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau (buruk/sedang/baik) ditentukan oleh NPSS. Untuk menghitung NPSS perlu diperhatikan bobot

masing-masing IKU terhadap SS tersebut dengan indeks toleransi 0%. Sistem pembobotan yang digunakan didasarkan atas tingkat validitas IKU seperti Tabel

Status capaian NPSS ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut:

Baik	Sedang	Buruk
Indeks Capaian >100 %	Indeks Capaian =100%	Indeks Capaian < 100 %

Untuk melakukan pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menentukan dan menyepakati standar status kinerja NPSS sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

KLASIFIKASI			STATUS NPSS (Toleransi 0%)
MAXIMIZ E	MINIMIZ E	STABILIZE	
X < 100%	X > 100%	X > 100% atau X < 100%	Buruk
X = 100%	X = 100%	-	Sedang
X ≥ 100%	X ≤ 100%	X = 100%	Baik

Dalam melakukan pengukuran kinerja harus menentukan klasifikasi target indikator kinerja diantaranya adalah : Maximixe adalah Semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; Minimize adalah Semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; Stabilize adalah semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

2. Metode Pengukuran

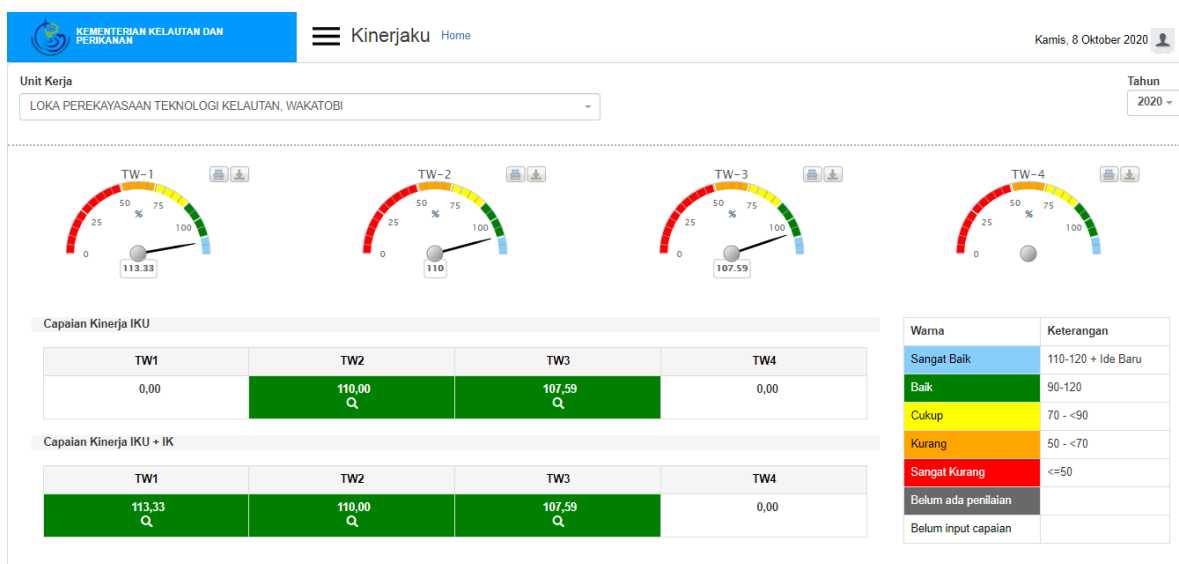
Metode pengukuran kinerja lingkup LPTK dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan dikumpulkan data dukung capaiannya dari penanggungjawab masing-masing kegiatan untuk kemudian dilaporkan hasilnya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PRESTASI KINERJA

Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LPTK pada triwulan III tahun 2020 sebesar 107,59%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar Dashboar Kinerjaku LPTK

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Capaian Kinerja Utama (IKU) LPTK Triwulan III tahun 2020 mengalami perubahan dan penyesuaian yang mengacu pada Balanced Score Card (BSC). Capaian indikator kinerja utama pada masing – masing sasaran strategis sampai dengan Triwulan III tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel Target dan Realisasi Output LPTK Triwulan III Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	OUTPUT	
			T	R
1.	Hasil Perekayasaan Teknologi Kelautan yang dimanfaatkan	1. Hasil Perekayasaan Teknologi Kelautan kelautan yang dimanfaatkan oleh sektor industri (Paket)	0	0

		2.	Prototipe alat dan mesin hasil hasil perekayasaan teknologi untuk pelestarian wilayah konservasi (Paket)	0	0
		3.	Unit kerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan yang ditingkatkan sarana dan prasarananya (Lokasi)	1	1
		4.	Jumlah jejaring dan/atau kerjasama Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)	2	2
		5.	Jumlah Karya Tulis Ilmiah hasil Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan yang dipublikasikan (Dokumen)	0	0
2.	Tatakelola Pemerintahan yang Baik pada Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	6.	Indeks profesionalitas ASN Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (Indeks)	0	0
		7.	Persentase unit kerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	75	97.50
		8.	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (Nilai)	87	95.99
		9.	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan dibandingkan realisasi anggaran Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan TA. 2019 (Persen)	0	0
		10.	Nilai kinerja anggaran Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	0	0

SS.1. : Hasil Perekayasaan Teknologi Kelautan yang dimanfaatkan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 5 (lima) IKU sebagai berikut :

IKU 1 :Hasil Perekayasaan Teknologi Kelautan kelautan yang dimanfaatkan oleh sektor industri (Paket)

Hasil riset inovasi kelautan yang bermanfaat untuk masyarakat yang telah uji coba dilingkungan sebenarnya dan memiliki tingkat kesiapan teknologi yang cukup sehingga dapat dilaksanakan produksi masal oleh industri.

Cara perhitungan untuk IKU ini yaitu hasil riset KP yang telah disertifikasi alat (sertifikat).

Tabel 0.1. Capaian IKU 1 pada Triwulan III Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Target TW III	Capaian TW III
Hasil Perekayasaan Teknologi Kelautan kelautan yang dimanfaatkan oleh sektor industri	1	0	0

Belum ada realisasi IKU 1 pada TW III, dimana IKU ini ditargetkan tercapai pada TW IV. Tidak ada pembandingan dengan tahun lalu, dikarenakan IKU ini tidak ada pada tahun lalu. Progres pencapaian IKU ini hingga TW III adalah hasil perekayasaan yakni WakatobiAIS telah dua kali menjalani pengujian laboratorium Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP) di Bulan September dan Oktober, sehingga tinggal menunggu keluarnya sertifikat.

IKU 2: Prototipe alat dan mesin hasil hasil perekayasaan teknologi untuk pelestarian wilayah konservasi(Paket)

Rancang bangun dan purwarupa hasil riset inovasi kelautan yang untuk pemantauan sumber daya laut dan pesisir.

Cara perhitungan untuk IKU ini yaitu Desain/Rancang Bangun Inovasi hasil Riset Teknologi Kelautan yang dihasilkan

Tabel 0.2. Capaian IKU 2 pada Triwulan III Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Target TW III	Capaian TW III
Prototipe alat dan mesin hasil hasil perekayasaan teknologi untuk pelestarian wilayah konservasi	1	0	0

Belum ada realisasi IKU 1 pada TW III, dimana IKU ini ditargetkan tercapai pada TW IV. Tidak ada pembandingan dengan tahun lalu, dikarenakan IKU ini tidak ada pada tahun lalu. Progres pencapaian IKU ini hingga TW III masih melakukan pengembangan terkait desain

substrat (main substrat dan mini substrat) serta pembuatan elektroda biorock ex-situ.

IKU 3: Unit kerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan yang ditingkatkan sarana dan prasarananya (Lokasi)

Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup LPTK. Cara perhitungan untuk IKU ini yaitu Jumlah Sarana dan prasarana yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal

Tabel 0.3. Capaian IKU 3 pada Triwulan III Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Target TW III	Capaian TW III
Unit kerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan yang ditingkatkan sarana dan prasarananya	1	1	1

Realisasi IKU 3 telah tercapai sebelumnya di TW II yakni pengadaan peralatan kantor yang pekerjaannya telah selesai dan telah diterbitkannya BAST Barang. Tidak ada pembandingan dengan tahun lalu, dikarenakan IKU ini tidak ada pada tahun lalu. Tercapainya IKU ini karena Belanja modal untuk peningkatan sarana dan prasarana LPTK sesuai dengan target dan waktu yang telah ditentukan dalam kontrak.

IKU 4 : Jumlah jejaring dan/atau kerjasama Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)

Jejaring dan kemitraan penelitian dan pengembangan untuk identifikasi dan mendapatkan strategi penyelesaian permasalahan dan kendala pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Teknik menghitungnya yaitu akumulasi Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerjasama yang dijalin oleh satuan kerja lingkup LPTK yang difasilitasi oleh Sekretariat BRSDM pada tahun yang masih berjalan dan terbentuk di tahun 2020. Dukungan jejaring dan kemitraan antara lain dalam bentuk dokumen kerjasama yang terjalin dengan stakeholder. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut:

Tabel 0.4 Capaian IKU 4 pada Triwulan III Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Target TW III	Capaian TW III
Jumlah jejaring dan/atau kerjasama Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan yang disepakati dan ditindaklanjuti	2	2	2

Dari tabel diatas terlihat bahwa progress capaian jumlah jejaring dan/atau kerjasama Riset Kelautan yang terbentuk sampai dengan TW III adalah 2 yakni kerjasama dengan Stasiun Meterologi Maritim Kelas II Kendari BMKG. dan dengan pihak PT. Duaempattujuh. Pada tahun sebelumnya di triwulan yang sama capaian IKU ini lebih besar dikarenakan capaiannya merupakan kerjasama on going di tahun sebelumnya. Capaian IKU ini meningkat dibandingkan pada TW II yakni 1 kerjasama dikarenakan terus dilakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk penandatanganan walaupun sempat terganggu dengan adanya covid-19.

IKU 5 :Jumlah Karya Tulis Ilmiah hasil Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan yang dipublikasikan (Dokumen)

IKU ini didefinisikan sebagai tulisan yang disusun berdasarkan data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh peneliti/perekayasa Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan yang telah diterbitkan pada suatu jurnal atau prosiding dalam dan luar negeri. Teknik menghitungnya yaitu jumlah karya tulis ilmiah yang sudah diterbitkan. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut:

Tabel 0.5. Capaian IKU 5 pada Triwulan III Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Target TW III	Capaian TW III
Jumlah Karya Tulis Ilmiah hasil Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan yang dipublikasikan	5	0	0

Sampai dengan TW III, IKU ini belum ada capaian. Sama dengan tahun sebelumnya, IKU ini direncanakan tercapai pada TW IV. Progres pencapaian IKU ini hingga TW III, 2 naskah KTI telah diajukan menunggu diterbitkan pada Jurnal Ilmiah sedangkan 3 KTI sementara proses penyusunan.

SS.2. : Tatakelola Pemerintahan yang Baik pada Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 5 (lima) IKU sebagai berikut :

IKU 6 : Indeks Profesionalitas ASN lingkup LPTK

Indikator ini merupakan IKU baru dan dihitung berdasarkan:

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatir Sipil Negara.

Formulasi IKU ini terdiri dari 4 komponen dengan bobot sebagai berikut :

1. Kualifikasi (25%), meliputi pendidikan terkini pegawai dengan ketentuan sesuai SK pangkat terakhir atau SK pencantuman gelar yang sudah di update pada aplikasi SIMPEG online KKP.
2. Kompetensi (40%), meliputi kompetensi pegawai yang mengikuti diklat baik dari Diklatpim, ataupun diklat fungsional yang sudah di update pada aplikasi SIMPEG online KKP.
3. Kinerja (30%), meliputi penilaian prestasi kerja online KKP dan dikolaborasikan dengan database kepegawaian.
4. Disiplin (5%), meliputi disiplin pegawai yang diambil baik dari yang pernah/tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin yang telah di update pada aplikasi SIMPEG online KKP.

Tabel 0.7. Capaian IKU 6 pada Triwulan I Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Target TW III	Capaian TW III
Indeks Profesionalitas ASN lingkup LPTK	72	0	0

Berdasarkan tabel diatas capaian IP ASN LPTK pada TW III masih kosong, sama dengan capaian di tahun sebelumnya pada triwulan yang sama dikarenakan situs <http://ropeg.kkp.go.id:4080/?#/ip-asn/eselon> sebagai tempat dikeluarkannya nilai IP ASN baru dapat efektif dipergunakan capaiannya saat akhir tepatnya TW IV. Progres capaian IKU ini nilai IP ASN LPTK hingga TW III adalah 64.04, dimana nilai ini masih bertambah salah satunya disebabkan beberapa pegawai telah mengikuti diklat 20 JP serta seminar dan menunggu keluarnya sertifikat untuk diinput pada SIMPEG sebagai basis data IP ASN.

IKU 7 :Persentase unit kerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

Indikator ini merupakan IKU baru. Nilai Indeks Penerapan Manajemen Pengetahuan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai MP} = \text{Keikutsertaan pegawai} + \text{Keaktifan} + \text{Jumlah dokumen MP yang di upload}$$

Bobot :

Keikutsertaan pegawai = 40%

Keaktifan = 40%

Jumlah dokumen MP yang di upload = 20%

Tabel 0.8. Capaian IKU 7 pada Triwulan III Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Target TW III	Capaian TW III
Persentase unit kerja Loka Perencanaan Teknologi Kelautan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	82	75	97.50

Realisasi output pada TW III yaitu sebesar 97.50% dari target 75 meningkat dari capaian TW II yakni 92.50. Tercapainya IKU ini dikarenakan peran aktif para pejabat struktural dalam keikutsertaan dan keaktifannya membagikan informasi melalui Bitrix24. Adapun rincian Prosentase Manajemen Pengetahuan terstandar Bitrix24 KKP lingkup LPTK sebagai berikut :

PENGHITUNGAN PENERAPAN MP LPTK 2020			
DOKUMEN			
Dokumen	Keterangan	Total (dokumen)	%
Perjanjian Kinerja (Level 3 & 4)	4	4	100,00%
Laporan Capaian Kinerja (LKJ Tahun 2019, LKJ Intern TW I, TWII, TWIII Tahun 2020)	3	4	75,00%
Rata-rata			87,50%
KEIKUTSERTAAN			
Level	Gabung (orang)	Total (orang)	%
3	1	1	100,00%
4	3	3	100,00%
Staf *)	3	3	100,00%
Rata-rata			100,00%
*) minimal 2 orang per Unit Eselon IV			
KEAKTIFAN			
Level	Aktif (orang)	Total (orang)	%
3	1	1	100,00%
4	3	3	100,00%
Rata-rata			100,00%
PENILAIAN			
Komponen	Nilai	Bobot	%
Dokumen	87,50%	20%	17,50%
Keikutsertaan	100,00%	40%	40,00%
Keaktifan	100,00%	40%	40,00%
Jumlah		Capaian	97,50%
		Target	75%

IKU 8 : Nilai kinerja pelaksanaan anggaran LPTK

Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan spending review terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerpan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus.

Ada 12 formulasi sebagai bahan untuk penghitungan nilai kinerja anggaran LPTK dengan mengacu pada DJPB, yaitu sebagai berikut :

1. Revisi DIPA

- a. Indikator Revisi DIPA digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran oleh K/L dengan menghitung rasio jumlah pengajuan revisi terhadap jumlah DIPA yang dikelola.
- b. Jenis revisi yang mejadi objek penilaian kinerja adalah revisi DIPA pagu tetap, tidak termasuk revisi karena kesalahan administrasi.
- c. Semakin rendah angka persentase revisi DIPA yang diperoleh, maka semakin baik kinerja perencanaan anggaran pada K/L tersebut.

$$\left(\frac{\sum \text{Target Revisi DIPA}}{\sum \text{Revisi DIPA}} \right)$$

2. Deviasi RPD (Halaman III DIPA)

- a. Indikator Deviasi Halaman III DIPA digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran, dengan mengukur rasio tingkat deviasi antara realisasi anggaran dibandingkan dengan rencana penarikan pada halaman III DIPA
- b. Semakin rendah persentase deviasi (angka absolut) yang diperoleh, maka semakin baik kualitas rencana penarikan halaman III DIPA dan kinerja realisasi anggaran K/L

$$\text{Rata -rata } || ((\text{Realisasi Penarikan Dana}) - (\text{Perencanaan Hal III DIPA})) || \\ /(\text{Perencanaan Hal III DIPA})$$

3. Pengelolaan UP

- a. Indikator pengelolaan UP digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan Uang Persediaan terkait ketepatan waktu pertanggungjawabannya. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio pengajuan SPM GUP/PTUP tepat waktu dibandingkan dengan total SPM GUP/PTUP

- b. Pengajuan SPM GUP/PTUP dapat dikategorikan tepat waktu apabila disampaikan ke KPPN dalam 1 bulan (30 hari kalender). Pengajuan SPM GUP sekurang-kurangnya telah digunakan sebanyak 50% dari besaran UP yang dimintakan
- c. Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja pengelolaan UP

$$\left(\frac{\sum \text{SPM GUP yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{SPM GUP}} \right) \times 100$$

4. Rekon LPJ Bendahara

- a. Indikator LPJ Bendahara digunakan untuk menilai kinerja Bendahara Pengeluaran dalam penyusunan dan penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio pengajuan LPJ tepat waktu dibandingkan dengan total LPJ yang disampaikan ke KPPN
- b. Pengajuan LPJ Bendahara dapat dikategorikan tepat waktu apabila disampaikan ke KPPN maksimal s.d. tanggal 10 awal bulan berikutnya.
- c. Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja penyampaian LPJ Bendahara

$$\left(\frac{\sum \text{Data LPJ Bendahara yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{LPJ Bendahara yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

5. Data Kontrak

- a. Indikator penyampaian data kontrak digunakan untuk menilai kinerja pejabat pengelola keuangan dalam mengadministrasikan data kontrak khususnya terkait penyampaian ke KPPN. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio data kontrak tepat waktu dibandingkan dengan total data kontrak yang diajukan ke KPPN
- b. Penyampaian data kontrak dapat dikategorikan tepat waktu apabila disampaikan ke KPPN maksimal 5 hari kerja sejak tanggal penandatanganan kontrak
- c. Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja penyampaian data kontrak

$$\left(\frac{\sum \text{Data kontrak yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{data kontrak yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

6. Penyelesaian Tagihan

- a. Indikator penyelesaian tagihan digunakan untuk menilai kinerja pejabat pengelolaan keuangan dalam mengadministrasikan tagihan kontraktual yang telah jatuh tempo hingga diajukan SPM atas tagihan tersebut ke KPPN. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio SPM tepat waktu dibandingkan dengan total SPM yang diajukan KPPN

- b. SPM penyelesaian tagihan dapat dikategorikan tepat waktu apabila SPM LS (Non-Belanja Pegawai) disampaikan ke KPPN maksimal 17 hari kerja setelah tanggal jatuh tempo pembayaran
- c. Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja penyelesaian tagihannya

$$\left(\frac{\sum \text{Tagihan yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{Total Tagihan}} \right) \times 100$$

7. Penyerapan Anggaran

- a. Indikator penyerapan anggaran digunakan untuk menilai kualitas penyerapan anggaran berdasarkan target penyerapan pada tiap triwulan. Penilaian dihitung berdasarkan persentase capaian realisasi dibandingkan dengan target penyerapan anggaran pemerintah
- b. Target penyerapan tahun 2017 yakni TW 1: 15%; TW 2: 40%; TW 3: 60%; TW 4: 90%
- c. Kinerja penyerapan anggaran diharapkan tidak hanya berfokus pada capaian realisasi anggarannya, melainkan juga capaian output setiap K/L, dan dilakukan secara efisien dan efektif
- d. Penyerapan anggaran yang dapat mencapai target, maka nilainya semakin baik

$$\left(\frac{\sum \text{Realisasi Anggaran}}{\sum \text{Pagu}} \right) \times 100$$

8. Rektur SP2D

- a. Indikator SP2D digunakan untuk menilai kualitas SPM yang diajukan khususnya berkaitan dengan ketepatan data supplier pada SPM. Penilaian kinerja dihitung dengan mengukur rasio jumlah SP2D yang diretur SP2D yang diterbitkan
- b. Hal-hal yang sering menyebabkan retur SP2D antar lain kesalahan nomor rekening, kesalahan nama penerima, nomor rekening tidak aktif dll
- c. Semakin rendah persentase retur SP2D yang diperoleh, maka semakin baik kualitas SPM yang diajukan ke KPPN

$$\left(\frac{\sum \text{Retur SP2D}}{\sum \text{SP2D Terbit}} \right) \times 100$$

9. Perencanaan Kas

- a. Indikator Renkas/RPD harian digunakan untuk menilai kinerja manajemen pembayaran K/L, khususnya pada SPM yang diwajibkan disampaikan Renkas/RPD sebelum penyajuan SPM. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu Pengajuan SPM dibandingkan Renkas/RPD yang diajukan
- b. Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja kesesuaian pengajuan SPM dengan Renkas/RPD harian

$$\left(\frac{\sum \text{data Renkas yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{Renkas yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

10. Pengembalian SPM

- a. Indikator pengembalian SPM digunakan untuk menilai kinerja pejabat pengelola keuangan dalam menjamin kebenaran SPM yang diajukan ke KPPN. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio SPM salah dibandingkan dengan total SPM yang disampaikan ke KPPN
- b. Indikator pengembalian SPM digunakan untuk menilai kinerja pejabat pengelola keuangan dalam menjamin kebenaran SPM yang diajukan ke KPPN. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio SPM salah dibandingkan dengan total SPM yang disampaikan ke KPPN

$$\left(\frac{\sum \text{SPM salah}}{\sum \text{Total SPM yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

11. Dispensasi Penyampaian SPM

- a. Indikator pengembalian SPM digunakan untuk menilai kinerja pejabat pengelola keuangan dalam menjamin kebenaran SPM yang diajukan ke KPPN. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio SPM salah dibandingkan dengan total SPM yang disampaikan ke KPPN
- b. Indikator pengembalian SPM digunakan untuk menilai kinerja pejabat pengelola keuangan dalam menjamin kebenaran SPM yang diajukan ke KPPN. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio SPM salah dibandingkan dengan total SPM yang disampaikan ke KPPN

$$\left(\frac{\sum \text{Dispensasi SPM}}{\sum \text{Total SPM yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

12. Pagu Minus

- a. Indikator pagu minus Belanja Pegawai digunakan untuk menilai kualitas perencanaan dan penganggaran K/L khususnya terkait Belanja Pegawai, dengan mengukur rasio pagu minus Belanja Pegawai terhadap total Pagu Belanja Pegawai K/L
- b. Indikator pagu minus Belanja Pegawai digunakan untuk mengukur kinerja secara tahunan.
- c. Semakin rendah angka persentase pagu minus yang diperoleh, maka semakin baik kinerja perencanaan anggaran Belanja Pegawai pada K/L tersebut

$$\left(\frac{\sum \text{Pagu Minus}}{\sum \text{Pagu}} \right) \times 100$$

Nilai efisiensi anggaran diambil dari nilai yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI dalam aplikasi monev PA dengan alamat <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/>

Tabel 0.9. Capaian IKU 8 pada Triwulan III Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Target TW III	Capaian TW III
Nilai kinerja pelaksanaan anggaran LPTK	88	87	95.99

Berdasarkan tabel diatas capaian nilai pelaksanaan anggaran (IKPA) pada TW III adalah 95.99. Pada triwulan II nilai pada monev PA tidak keluar sehingga capaian 0. Beberapa hal yang menyebabkan tercapainya IKU ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : SEPTEMBER

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Konfirmasi Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM			
1	103	403820	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	Nilai	100.00	43.81	99.99	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	80.00	91.19	95%	95.99
				Bobot	5	5	5	15	8	5	5	15	12	10	5	0	5			
				Nilai Akhir	5.00	2.19	5.00	15.00	8.00	5.00	5.00	15.00	12.00	10.00	5.00	0.00	4.00			
				Nilai Aspek	81.27			100.00				100.00				80.00				

Disclaimer:

- 1) Modul Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran menampilkan data transaksi untuk periode Januari s.d. Desember 2020 sesuai parameter periode yang dipilih. Nilai indikator pada modul ini ditampilkan untuk kepentingan pemeliharaan data dan manajerial, serta tidak menjadi basis penilaian IKPA OMSPAN oleh BUN.
- 2) Untuk mengakses nilai IKPA yang menjadi basis penilaian kembali IKPA dalam [S-614/PB/2020](#) tanggal 17 Juli 2020 tentang Penilaian IKPA K/L Triwulan III dan IV Tahun 2020 pada Aplikasi OM-SPAN, silahkan akses modul Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Reaktivasi).

IKU 9 : Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Loka Perencanaan Teknologi Kelautan dibandingkan realisasi anggaran Loka Perencanaan Teknologi Kelautan TA. 2019 (Persen)
Batas tertinggi persentase temuan LHP BPK atas laporan keuangan LPTK dibandingkan realisasi anggaran sesuai dengan yang ditetapkan Biro Keuangan KKP. Tujuan dari IKU ini yaitu untuk mendukung tercapainya pengelolaan anggaran dan kegiatan yang efektif, efisien, dan ekuntabel. Bukti dari capaian akhir IKU ini adalah hasil LHP BPK atas Laporan Keuangan (LK) Tahun 2019/2020 yang sudah di tindaklanjuti, sedangkan untuk bukti capaian perbulannya yaitu laporan hasil tindaklanjut LHP. IKU ini menggunakan klasifikasi minimize, dimana capaian yang diharapkan adalah lebih rendah dari target yang ditetapkan.

Tabel 0.10. Capaian IKU 9 pada Triwulan III Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Target TW III	Capaian TW III
Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Loka Perencanaan Teknologi Kelautan dibandingkan realisasi anggaran Loka Perencanaan Teknologi Kelautan TA. 2019	1	0	0

Hi

ngga TW III capaian IKU ini masih 0 sama dengan TW II. IKU ini ditargetkan tercapai pada akhir tahun. Perbandingan dengan tahun lalu yaitu di TW III nilainya bersumber dari capaian yang disepakati oleh sekretariat BRSDM yakni 0.01%. Progres capaian IKU ini menunggu nilai yang dikeluarkan oleh Itjen.

IKU 10 : Nilai Kinerja Anggaran Loka Perencanaan Teknologi Kelautan (Nilai)

Nilai kinerja anggaran didasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya.

Nilai efisiensi anggaran diambil dari nilai yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dalam aplikasi SMART DJA dengan alamat <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Tabel 0.10. Capaian IKU 10 pada Triwulan II Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Target TW III	Capaian TW III
Nilai Kinerja Anggaran Loka Perencanaan Teknologi Kelautan	85	0	0

Berdasarkan tabel diatas capaian nilai kinerja anggaran pada TW III masih kosong sama dengan capaian TWII karena IKU ini ditargetkan pada akhir tahun. Tidak dapat dibandingkan karena IKU ini tidak ada pada tahun sebelumnya. Progres Capaian IKU ini hingga bulan September nilai kinerja anggaran LPTK sesuai dashboard pada Smart DJA adalah 47.29 dan masih akan bertambah hingga berakhirnya tahun anggaran.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan anggaran harus dikelola secara optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan, sampai dengan TW III T.A 2020 penyerapan anggaran LPTK Wakatobi adalah sebesar Rp 3.191.391.710,- atau sebesar 68.21%. Berikut tabel realisasi anggaran Triwulan III Tahun 2020:

Tabel 0.60. Tabel realisasi anggaran TW III TA. 2020

No	Kode dan Nama Kegiatan	Keuangan		
		Pagu	Realisasi	%
1	Sarana dan Prasarana Riset Kelautan[Base Line]	100.000.000	99.737.000	99,74%
2	Prototipe Alat dan Mesin Hasil Riset dan Perekayasaan Kelautan	150.000.000	71.308.057	47,54%
3	Alat dan Mesin hasil Riset dan Perekayasaan Kelautan Siap Guna	480.000.000	345.349.808	71,95%
4	Layanan Dukungan Manajemen Satker	415.116.000	148.350.855	35,74%
5	Layanan Perkantoran	4.508.079.000	3.191.391.710	70,79%
Total		5.653.195.000	3.856.137.430	68,21%

Dalam perjalanannya terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :

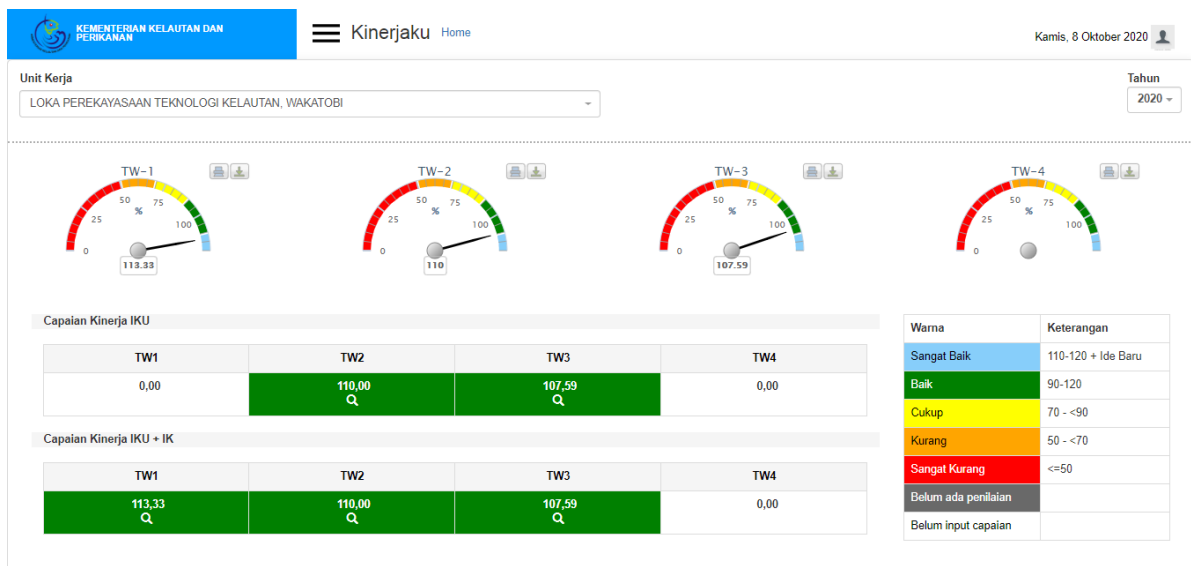
1. Akibat dampak covid-19 penyerapan pada kegiatan manajerial khususnya perjalanan dinas tidak terserap dengan baik dikarenakan seluruh kegiatan dialihkan melalui daring.
2. Keterlambatan penyampaian tagihan dari Para Pelaksana/Penanggung Jawab Kegiatan salah satunya dikarenakan covid-19, yang berimplikasi pada terlambatnya penyampaian LPJ ke KPPN

BAB IV PENUTUP

A. CAPAIAN KINERJA UTAMA

Pada tahun 2020 LPTK memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 2 Sasaran Strategis dan 10 Indikator Kinerja Utama.

Pengukuran capaian kinerja LPTK Triwulan III tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LPTK sebesar 107.59%



Selama Triwulan III tahun 2020, dari 10 IKU BRSDM, terdapat 4 IKU berstatus hijau, sisanya akan diukur pada triwulan selanjutnya. Rincian target dan realiasi dari 4 IKU tersebut adalah :

1. IKU Unit kerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan yang ditingkatkan sarana dan prasarananya dengan target 1 telah tercapai 1 sejak TW II.
2. IKU Jumlah jejaring dan/atau kerjasama Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan yang disepakati dan ditindaklanjuti dengan Target 2 telah tercapai 2 Dokumen kerjasama.
3. IKU Persentase unit kerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dengan Target 75 % telah tercapai 97.50 %
4. IKU Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan dengan target 87 telah tercapai 95.99

B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

Permasalahan dalam pencapaian IKU LPTK diantaranya :

1. Beberapa IKU tercapai diakhir tahun sempat terganggu akibat covid-19 misalnya IKU Prototipe alat dan mesin, sehingga uji coba ex-situ sempat terganggu.
2. Beberapa Pegawai Fungsional Perekayasa telah pindah tugas sehingga penyusunan KTI sedikit tertunda.

Sebagai Tindaklanjut dari permasalahan diatas :

1. Telah melakukan revisi rencana kegiatan riset hingga ditargetkan kegiatan bisa rampung sebelum berakhirnya tahun anggaran.
2. Telah diajukan beberapa naskah KTI, menunggu diterbitkan pada Jurnal. Sedangkan sisanya terus dimonitoring penyusunannya.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KOMPLEK BINA SAMUDERA JALAN PASIR PUTIH I ANCOL TIMUR LANTAI IV JAKARTA 14430
TELEPON (021) 64700755 EXT. 3120, FAKSIMILE (021) 64711654
LAMAN www.pusriskel.litbang.kkp.go.id POS ELEKTRONIK : pusriskel@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN
PUSAT RISET KELAUTAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Akhmatul Ferlin**

Jabatan : Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Rudi Alek Wahyudin**

Jabatan : Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Juni 2020

Pihak Kedua
Plt Kepala Pusat Riset Kelautan

Rudi Alek Wahyudin

Pihak Pertama
Kepala Loka Perekayasaan
Teknologi Kelautan

Akhmatul Ferlin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN
PUSAT RISET KELAUTAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2020
1	Hasil Perekayasaan Teknologi Kelautan yang dimanfaatkan	1	Hasil Perekayasaan Teknologi Kelautan yang dimanfaatkan oleh sektor industri (Paket)	1
		2	Prototipe alat dan mesin hasil perekayasaan teknologi untuk pelestarian wilayah konservasi (Paket)	1
		3	Unit kerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan yang ditingkatkan sarana dan prasarananya (Lokasi)	1
		4	Jejaring dan/atau kerjasama Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)	2
		5	Karya Tulis Ilmiah hasil Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan yang dipublikasikan (Dokumen)	5
2	Tata kelola Pemerintahan yang Baik pada Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	6	Indeks profesionalitas ASN Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (Indeks)	72
		7	Persentase unit kerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (Persen)	82
		8	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (Nilai)	Baik (88)
		9	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan dibandingkan realisasi anggaran Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan TA. 2019 (Persen)	1
		10	Nilai Kinerja Anggaran Loka Perekayasaan Teknologi (Nilai)	85

Program : Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kegiatan : Riset Kelautan
Satker : Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan
Anggaran Tahun 2020 : Rp. 5.653.195.000,-

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Prototipe Alat dan Mesin Hasil Riset dan Perekayasaan Kelautan	150.000.000
2	Alat dan Mesin hasil Riset dan Perekayasaan Kelautan Siap Guna	480.000.000
3	Sarana dan Prasarana Riset Kelautan	100.000.000
4	Layanan Dukungan Manajemen Satker	415.116.000
5	Layanan Perkantoran	4.508.079.000
JUMLAH		5.653.195.000

Jakarta, 23 Juni 2020

Pihak Kedua
Plt Kepala Pusat Riset Kelautan



Rudi Alek Wahyudin

Pihak Pertama
Kepala Loka Perekayasaan
Teknologi Kelautan



Akhmatul Ferlin